

DOKUMENTASI PENYUSUNAN SP

Uji Publik Standar Pelayanan (Pariaman, 3 Mei 2018)



The screenshot shows a web browser window displaying a news article. The browser's address bar shows the URL dukcapil.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com_content&. The article title is "Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Disdukcapil Lakukan Uji Publik Standar Pelayanan". The author is listed as "Written by Super User". The article text discusses the public service standard test conducted by the Padang Pariaman District Civil Service and Registration Office on May 3, 2018. It mentions that the test involves representatives of service users, community figures, and officials from various agencies. The article also references a 2009 law regarding public service standards and mentions the participation of 80 people in the test. A banner in the background of the article image reads "UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL".

Dukcapil Padang Pariaman - Ti X

dukcapil.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com_content&

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Disdukcapil Lakukan Uji Publik Standar Pelayanan

Written by Super User

Padang Pariaman, 3 Mei 2018.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman kembali melakukan peninjauan ulang terhadap standar pelayanan melalui uji publik standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan di dinas tersebut.

Pelaksanaan uji publik standar pelayanan melibatkan perwakilan para pengguna layanan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari dan kecamatan, para petugas yang terlibat dalam pelayanan di nagari, akademisi, dinas instansi terkait pelayanan seperti pelayanan perizinan dan wartawan media cetak maupun elektronik.

"Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 15 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Kita telah memiliki standar pelayanan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan aturan-aturan, kita perlu melakukan uji publik terhadap standar yang telah ditetapkan agar tidak terjadi ketimpangan hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna layanan publik", jelas Muhammad Fadhy, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan dimoderatori oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Padang Pariaman, Drs. Martoni, uji publik standar pelayanan berlangsung alot. Terjadi pembahasan yang cukup hangat dan mendalam antar pengguna layanan dengan penyelenggara Dinas Dukcapil. Sebanyak 80 peserta berpartisipasi dalam uji publik ini dan memberikan kontribusi terhadap berbagai hal yang bersifat membangun pelayanan yang lebih baik.

Bertempat di Ruang Pertemuan Bupati Padang Pariaman, 25 jenis pelayanan menjadi topik pembahasan dalam uji publik kali ini diantaranya yang menjadi pokok pembahasan adalah pelayanan yang paling banyak dikunjungi masyarakat yaitu kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akte akte pencatatan sipil.

Salah satu tokoh yang bergelut di dunia pendidikan di Pariaman saat ini, Rasyid, SE, MM. memberikan masukan kepada pemerintah tentang upaya-upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada kesempatan berbeda, Bupati Padang Pariaman Drs. H. Ali Mukhni sangat mengapresiasi pelaksanaan uji publik ini. "OPD yang melakukan pelayanan publik apalagi yang menyentuh masyarakat secara langsung harus menetapkan standar pelayanan dan melakukan uji publik terhadap standar pelayanan tersebut. Kita akan dorong semua OPD untuk melakukan hal ini sehingga wajah pelayanan publik di Padang Pariaman menjadi lebih baik dari waktu ke waktu", ungkap Bupati Padang Pariaman menutup pembicaraan.



